

Judul : Purnawirawan diimbau tidak seret prajurit berpolitik
Tanggal : Kamis, 09 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Purnawirawan Diimbau tidak Seret Prajurit Berpolitik

PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengimbau para purnawirawan TNI agar tidak mengajak serta prajurit TNI aktif untuk terlibat tim sukses pemenangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Silakan untuk sesuai dengan hak pilihnya, tetapi kami juga memohon untuk tidak mengajak kami-kami yang masih netral ini. Karena TNI, saya yakin beliau-beliau tahu bahwa kami ini di pihak yang netral," ungkap Yudo di Jakarta, kemarin.

Yudo meminta seluruh purnawirawan tidak merecoki para prajurit untuk terlibat politik praktis. Namun, Yudo mengatakan dirinya tak mem-

permasalahkan jika para purnawirawan itu bergabung dalam timses capres. "Kami juga tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya," ujar Yudo.

Sebelumnya, Yudo juga menyatakan siap terkait dengan wacana pembentukan panitia kerja (panja) netralitas TNI. "Stap dong ini semuanya kalau untuk kebaikan," kata Yudo. Ia meyakini tujuan pembentukan panja untuk hal positif. Terlebih untuk membuktikan bahwa netralitas TNI terjaga.

Usulan Panja Netralitas TNI disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto. Utut mengaku khawatir apabila

pimpinan TNI menerima perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku panglima tertinggi. Prajurit tak bisa menolak perintah atasan.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga muruah DPR, buatlah panja netralitas TNI. Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan," ujar Utut.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut sekitar 115 ribu personel bakal dikerahkan guna pengamanan pesta demokrasi. Penempatan personel akan disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara

(TPS) yang ada.

"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8.000 per kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," kata dia.

Agus menambahkan, akan menindak tegas anggota yang tidak netral. Hal itu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi apabila melanggar undang-undang tersebut, akan ditindak pidana ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinannya," tegas Agus. (Boh/P-2)



MISUSANTO

APEL KESIAGAAN TNI-AD: Kendaraan lapis baja berjalan sesuai melakukan apel gelar pasukan kesiagaan pemilu di Monas, Jakarta, kemarin. Apel gelar pasukan itu dalam rangka memastikan kesiapsiagaan TNI-AD yang akan menurunkan 115 ribu personel untuk pengamanan Pemilu 2024 sekaligus mendeklarasikan pemilu damai.